

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA



**DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkah dan Rahmatnya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini memuat secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Terkait pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian didalamnya dan bersifat teknis karena merupakan strategi dan aktivitas dalam memenuhi aspek-aspek di bidang sosial

Tahun 2026 sebagai salah satu upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat, khususnya bagi pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Bekasi maupun masyarakat pada umumnya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010



DAFTAR ISI

1.	KATA PENGANTAR.....	i
2.	BAB I PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
3.	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	12
	2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
4.	BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI.....	25
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	26
	3.3 Program dan Kegiatan.....	27
5.	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	38
6.	BAB V PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

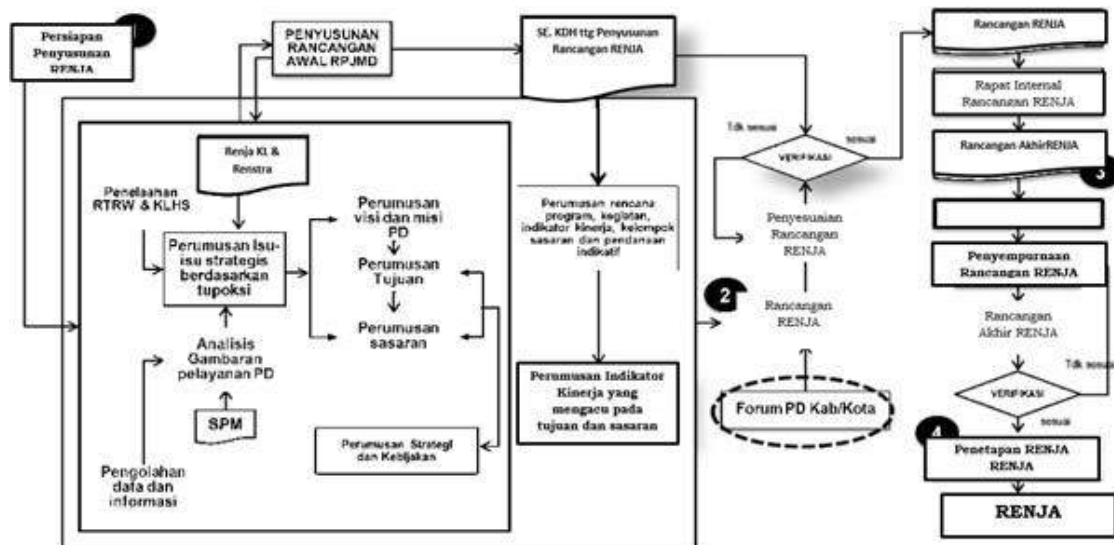
Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial kota Bekasi dan mempedomani Rencana Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2026 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial tahunan dan dijadikan pedoman penyusunan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2026. Renja SKPD tahun 2026 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana kerja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada lima tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam Rancangan Akhir RPJMD dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2026 Kota Bekasi diperkirakan masih dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Kota Bekasi.

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja disusun dengan tahapan, Persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Akhir, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan, Proses penyusunan Renja Dinas Sosial sebagai Berikut :

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renja



Keterkaitan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi:
 - a. Renja Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai dokumen teknis penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
 - b. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2026 memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu.;
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.
3. Keterkaitan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hubungannya dengan pengembangan bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial, dalam pemberian layanan kepada PPKS, salah satunya yang terkait dengan RTRW yaitu, masih minimnya fasilitas umum untuk penyandang Disabilitas dan belum terciptanya Kota Ramah Lansia.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2026, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2026.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Bekasi,
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 85 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026;
21. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 400.9.14/Kep.598-Bappelitbangda/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas Sosial untuk periode tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- b. memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2026;
- c. sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi;
- d. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program kesejahteraan sosial

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial tahun 2026 disusun dengan sistematika sbb :

- a. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- b. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Akhir SKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- c. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan dan Sasaran. Dinas Sosial Kota Bekasi, Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
- d. Bab 4 (empat) Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Sosial Kota Bekasi



-
- e. Bab 5 (Lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan Program dan Kegiatan mencakup 6 Program dengan 14 Kegiatan dan 44 sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.132.479.236 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.935.447.177 atau 89,73%,

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Prakiraan Capaian Tahun 2025.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi selama tahun 2024, merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja yang semua indikatornya telah terpenuhi.

Adapun Capaian Indikator Kinerja, di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT S/D TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023	RELISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM / KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2026	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	100%	42 Orang	42 Orang	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	21 Dokumen	21 Dokumen	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	80	80	80	100%	80	80	



				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	30	30	30	100%	30	30	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	



				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	25	25	25	100%	25	25	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30	30	30	100%	30	30	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	10	100%	10	10	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2	2	100%	2	2	
				Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	10	10	100%	10	10	
				Pengadaan peralatan da mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	100%	10	10	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%			



				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100%	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	10	10	100%	10	10



				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	85	85	85	100%	85	85	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	1	100%	1	1	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	1	1	1	100%	1	1	
						100%							
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	616 orang	616 orang	616 orang	616 orang	100%	616 orang	616 orang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	100%	12	12
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	110	110	110	100%	110	110
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	376	376	376	376	100%	376	376
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



						6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	100%	6000 Orang	6000 Orang	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1000	1000	1000	100%	1000	1000
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100%	1000 Orang	1000 Orang
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	200	200	200	100%	200	200



				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350	350	350	350	100%	350	350	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	100%	450 orang	450 orang	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	100%	450 orang	450 orang	



				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	100%	50	50	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	450	450	450	100%	450	450	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	450	450	450	100%	450	450	



				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	450	450	450	100%	450	450	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150	150	150	100%	150	150	
				Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	



					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	500 Orang	
					Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	100%	1200 Orang	1200 Orang	
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	



					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 oran	150 oran	150 oran	150 oran	100%	150 oran	150 oran	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	



				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	100%	50	50	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100%	90 Orang	90 Orang	



				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	
				Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100%			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	100%	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	



				Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 org	1.232.715 org	1.232.715 org	1.232.715 org	100%	1.232.715 org	1.232.715 org	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	100 org	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						100%			
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	100%	700 Orang	700 Orang	



				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	100%	350 Orang	350 Orang	
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	6	6	100%	6	6	
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	100%	400 Orang	400 Orang	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	600 Orang	600 Orang	



				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	100%	65 Orang	65 Orang
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	100%	3 Kampung	3 Kampung
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		1 Area	1 Area	1 Area	1 Area	100%	1 Area	1 Area
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Area	1 Area	1 Area	1 Area	100%	1 Area	1 Area



				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	2	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	248	248	248	248	100%	248	248	
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	10	10	10	100%	10	10	

2.1.2 Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	BB	BB	100%
			Nilai	80,50	92,06	114%
2	Meningkatnya Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	5%	12%	240%
3	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100%	100%	100%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Tahun 2024*

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai sesuai dengan target, adapun pencapaian sebagai berikut :



1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memiliki 2 indikator, diantaranya :
 - a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/042-LHE/ITKO.Irban UPD Tanggal 4 Juli 2024
 - b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, pada tahun 2024 memperoleh capaian 116%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **92,06** dengan interpretasi **“Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmani, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 5 Program dan 6 Kegiatan.
Target dari sasaran ini sebesar 5% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 5% atau sebesar



6.266 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 12% atau sebanyak 15.216 orang, sehingga Capaian Kinerja 240%.

3. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 250 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 250 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 121 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Adapun Capaian Indikator Kinerja diatas, di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana daftar di bawah ini :

A. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pemberdayaan Sosial

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

3. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penanganan Bencana

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 2.2, hasil evaluasi Kinerja Tahun 2024, semua Target pada Program dan Kegiatan telah terpenuhi/tercapai, sehingga tidak ada Program atau Kegiatan yang tidak memnuhi target.



B. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil evaluasi Kinerja Tahun 2024, semua Target pada Program dan Kegiatan telah terpenuhi/tercapai

C. Faktor-faktor, Implikasi yang timbul dan Kebijakan / Tindakan yang diambil

a. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pada realisasi program/kegiatan

1. Keterbatasan anggaran
2. Rasionalisasi anggaran
3. Realisasi berdasarkan Laporan orang terlantar yang diterima
4. Kurangnya waktu pelaksanaan

b. Implikasi yang timbul terhadap target kinerja hasil / keluaran

1. Perencanaan yang sudah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan
2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

c. Kebijakan/Tindakan yang harus diambil

1. Kegiatan tidak dilaksanakan semua dikarenakan keterbatasan anggaran.
2. Perencanaan yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial tahun 2024.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dicantumkan dalam tabel berikut. :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase PPKS Binaan yang mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase PPKS Binaan yang mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan Tabel diatas,berikut analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Pada Sasaran ini, memiliki 2 Indikator guna mendukung capaian sasaran, diantaranya :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada indikator ini, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan Tatakelola pemerintahan daerah bidang urusan sosial dengan mempertimbangkan capaian-capaian Kinerja Dinas Sosial, dimana evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi yang dikeluarkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/042-LHE/ITKO.Irban UPD Tanggal 4 Juli 2024, dengan tabel penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil penilaian evalausi AKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2023		2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	22,25	30	22,94
b	Pengukuran Kinerja	30	22,12	30	23.11
c	Pelaporan Kinerja	15	12,42	15	11,23
d	Evaluasi Internal	25	20,47	25	20,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,26	100	77,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan nilai ditahun 2024 dengan tahun 2023, walau tidak signifikan, sebesar 0,03, dimana

ditahun 2023 nilai AKIP 77,26 dan 2024 sebesar 77,29 dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap, yaitu “BB”

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

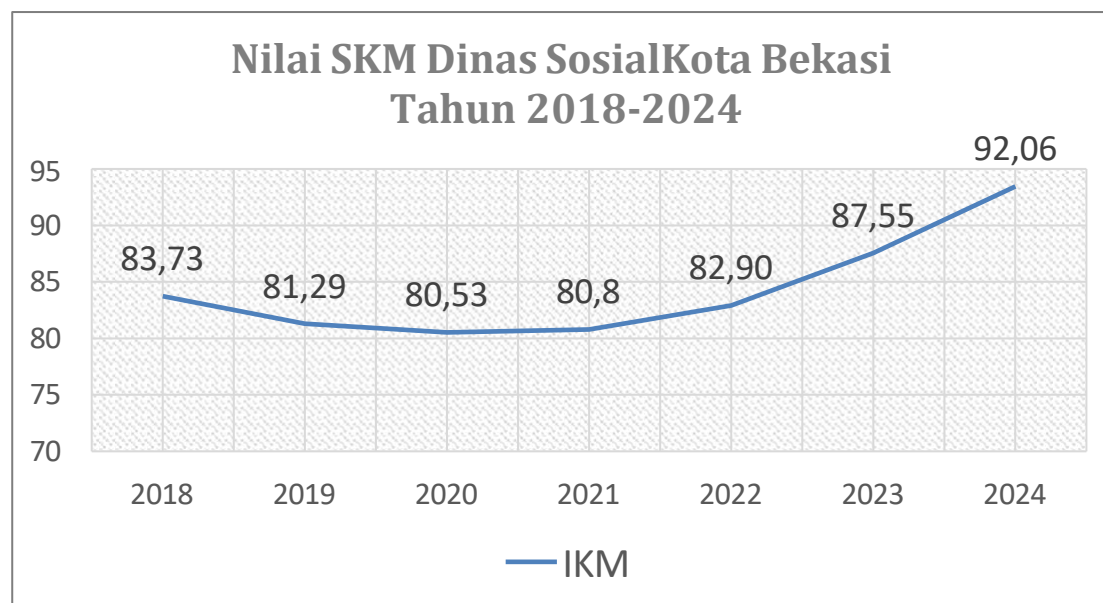
Indikator ini merupakan Tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai IKM Dinas Sosial melakukan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708), dimana tahun 2024 memperoleh capaian 106%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **92,06** dengan interpretasi **“Sangat Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tabel 3.3

Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : <http://sisukma.bekasikota.go.id>



Berdasarkan grafik diatas, ada kenaikan yang cukup signifikan dalam pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Sosial Kota Bekasi .

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Persentase PPKS binaan yang mandiri

Pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmani, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 3 Program dan 4 Kegiatan.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS binaan yang mandiri

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	persen	5	12	240

Sumber : LKIP Dinas Sosial Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 5%, dan realisasi mencapai 12% persen, Target dari sasaran ini sebesar 5% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 5% atau sebesar 6.266 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 12% atau sebanyak 15.216 orang, sehingga Capaian Kinerja 240%.



Sesuai dengan formulasi pada IKU Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024, maka perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang dibina}}{\text{Jumlah Sasaran PPKS di Kota Bekasi}} \times 100$$
$$\frac{15.216}{6.266} \times 100\%$$
$$= \mathbf{240\%}$$

dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2022 dan 2024

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	240%	Naik

Sumber : LKIP Dinas Sosial tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian yang meningkat pada tahun 2024. Sehingga sasaran strategis meningkatnya kinerja dan layanan publik di Dinas Sosial mengalami kenaikan yang signifikan.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Persentase PPKS binaan yang mandiri yang meningkat di Dinas Sosial antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen	13	5

Sumber : LKIP Dinas Sosial Tahun 2024

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga output dan outcome tepat sasaran.
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi;
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;



6. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
7. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
8. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural Dinas Sosial untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur Dinas Sosial terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
9. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja, Perjanjian Kinerja dan Surat Pernyataan Kesanggupan pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
10. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Sosial Kota Bekasi.
12. Penyesuaian Jumlah Target mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026

Pencapaian indikator Persentase PPKS binaan yang mandiri tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PPKS Binaan yang Mandiri

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100



3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri	
		2023	2024
Target	Persen	13	5
Realisasi	Persen	13	5

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri pada tahun 2023 sebesar 13% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 5%, Penurunan Jumlah Target di tahun 2024 disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen Renstra Tahun 2024-2026

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk



mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Kota Bekasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN			
			RENCANA		REALISASI	
			Rp	(%)	Rp	(%)
1.06.01.01 - 04	Program Rehabilitasi Sosial	4.653.328.000	4.653.328.000	100	4.259.258.784	91,53
1.06.01.01 - 04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.653.328.000	4.653.328.000	100	4.259.258.784	91,53
1.06.01.01 - 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	885.600.000	885.600.000	100	840.658.100	94,93
1.06.01.01 - 04.2.01.02	Penyediaan Sandang	114.000.000	114.000.000	100	112.667.450	98,83
1.06.01.01 - 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	760.000.000	760.000.000	100	645.709.680	84,96
1.06.01.01 - 04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	427.500.000	427.500.000	100	332.066.452	77,68
1.06.01.01 - 04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	212.600.000	212.600.000	100	192.873.000	90,72
1.06.01.01 - 04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.870.000.000	1.870.000.000	100	1.802.980.302	96,42
1.06.01.01 - 04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.800.000	55.800.000	100	55.362.300	99,22
1.06.01.01 - 04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	242.828.000	242.828.000	100	193.482.000	79,68
1.06.01.01 - 04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	85.000.000	85.000.000	100	83.459.500	98,19
1.06.01.01 - 06	Program Penanganan Bencana	2.115.138.234	2.115.138.234	100	2.017.475.720	95,38
1.06.01.01 - 06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.782.638.234	1.782.638.234	100	1.697.259.720	95,21
1.06.01.01 - 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	1.236.096.350	1.236.096.350	100	1.191.147.020	96,36
1.06.01.01 - 06.2.01.02	Penyediaan Sandang	237.500.000	237.500.000	100	226.210.000	95,25
1.06.01.01 - 06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	95.000.000	95.000.000	100	77.738.600	81,83
1.06.01.01 - 06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	124.041.884	124.041.884	100	122.355.000	98,64
1.06.01.01 - 06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	90.000.000	90.000.000	100	79.809.100	88,68



1.06.01.01 - 06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	332.500.000	332.500.000	100	320.216.000	96,31
1.06.01.01 - 06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	190.000.000	190.000.000	100	184.887.000	97,31
1.06.01.01 - 06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	142.500.000	142.500.000	100	135.329.000	94,97
1.06.01.01 - 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
1.06.01.01 - 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
1.06.01.01 - 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
TOTAL		9.604.306.296	9.604.306.296	100	8.915.908.979	92,83

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PPKS binaan yang mandiri, Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 31.132.479.236 (Tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.935.447.177 (Dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 89,73%, sedangkan Anggaran untuk penanganan PPKS Binaan yang Mandiri sebesar Rp. **9.604.306.296** (Sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

1. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah PPKS Terlantar yang terdiri dari, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti, dimana capaiannya sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Rehabilitasi Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Disabilitas	1128	1128	100
	Anak Terlantar	1152	1152	100
	Lanjut Usia Terlantar	370	370	100



	Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	670	670	100
	Jumlah	3320	3320	

Dari Tabel diatas, Jumlah PPKS Binaan yang mandiri pada Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 3.320 orang, dengan berbagai bantuan yang diberikan sesuai dengan subkegiatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, Seperti : Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Alat Bantu, Layanan Rujukan, Layanan Reunifikasi , Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dan jenis bantuan lainnya.

2. Program Penanganan Bencana

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sama seperti Program Rehabilitasi Sosial, Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100%, dan untuk capaian tahun 2024 telah dicapai 100% atau 2.000 Korban Bencana, Baik Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tabel 3.10

Jumlah Korban Bencana Tahun 2024

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
1.	Bencana Banjir	246	983	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Bencana Longsor	-	-	
3.	Bencana Puting Beliung	-	-	
4	Bencana Sosial		1.017	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah		2.000	



Jenis Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berupa, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Indikator ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.
2. Melakukan Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator;

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pada Program ini, dilaksanakan Kegiatan atau Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat miskin, sebagai salah satu

upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi, Target 10.368 orang, dengan realisasi sebanyak 9.896 orang atau 95,44%, Program dan Kegiatan ini didukung anggaran sebesar **Rp. 2.835.840.062** (Dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu enam puluh dua rupiah), anggaran ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Realisasi sebesar **Rp. 2.639.174.475** (Dua miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau **93,06 %**.

Kegiatan ini memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin di Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	Tahap 1	7.970	7.718	97
	Tahap 2	2.398	2.178	91
	Jumlah	10.368	9.896	96

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Persentase PSKS yang berfungsi

pada sasaran ini, PSKS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, PSKS di Kota Bekasi diantaranya:

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
3. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)

4. Koordinator PKH
5. Yayasan/Panti yang dikelola Masyarakat.
6. Karang Taruna, dll.

Dalam Hal pencapaian indikator **Persentase PSKS yang berfungsi**, di tahun 2024, Dinas Sosial bersinergi secara langsung dengan PSKS, dimana tugas Pokok dan fungsi PSKS adalah **Melakukan Pendampingan Terhadap PPKS dalam mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial**.

Dinas Sosial dalam mewujudkan Keberfungsian PSKS melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap PSKS dimana Keberfungsian PSKS dilihat dari Jumlah PPKS yang diberikan pendampingan dalam mendapatkan jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial, Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% , Indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase PSKS yang berfungsi	persen	100	100	100

Sumber : LKIP Dinas Sosial Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 100 Persen, realisasi mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. dengan target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan



jumlah 250 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 238 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Jumlah PSKS yang berfungsi x 100%

Jumlah PSKS di Kota Bekasi

250 x 100 %

250

= **100%**

Untuk melihat perbandingan capaian Persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Data Capaian persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2022 dan 2024

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	Tetap

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian tetap pada tahun 2024

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial antara tahun 2022 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalannya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
5. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;

Pencapaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.14
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Prosentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berfungsi	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial tahun 2023 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase PSKS yang berfungsi Target Akhir Renstra 2024-202

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PSKS Yang Berfungsi	
		2023	2024
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk



mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	PSKS yang berfungsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 4.495.500.000	4.103.700.625	91,28	100	13,80
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.495.500.000	4.103.700.625	91,28	100	8,72
		Peningkatan Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 807.500.000	738.208.000	91,42	100	8,58
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 162.000.000	156.858.000	96,83	100	3,17
		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp. 129.355.000	96,79	100	3,21
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3.426.000.000	Rp. 2.090.914.900	84,75	100	15,25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **4.495.500.000,-** (Empat Miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **4.103.700.625,-** (*Empat Miliar seratus tiga juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang

dipergunakan untuk mencapai Persentase PPKS binaan yang mandiri mencapai 91,28 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RANCANGAN AKHIR RPJMD, Dinas Sosial Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Kesejahteraan Sosial selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- 2). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- 3). Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran serta tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial kota Bekasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial



1. Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di **luar** Panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di **luar** panti
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
3. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :
 - Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Sakti Peksos Kota Bekasi
 - Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.
 - Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.
5. Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi sasaran, meningkatnya urbanisasi menjadi salah satu faktor permasalahan meningkatnya PPKS di Kota Bekasi, terutama gelandangan dan pengemis, yang kemudian sering berkembang menjadi permasalahan sosial lainnya, seperti anak terlantar, disabilitas terlantar sampai dengan lanjut usia terlantar, serta tidak menutup kemungkinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), selain



urbanisasi, masih terdapat banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Panti yang memerlukan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kota Bekasi, PPKS diluar Panti, yang umumnya menjadi warga binaan panti atau yayasan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat, melalui Dinas Sosial Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memenuhi sedikitnya sandang dan papan, sedangkan dalam upaya penanganan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran serta **Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, dimana PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial, sehingga pencapaian Kinerja Dinas Sosial bisa Optimal.

Berdasarkan keterangan diatas, maka permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Sosial kota Bekasi diantaranya :

- 1) Meningkatnya Jumlah PPKS di Kota Bekasi;
- 2) Minimnya Sumber Daya PSKS yang Kompeten.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024-2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi serta Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang terdapat di dalam RANCANGAN AKHIR RPJMD 2025- 2029.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Akhir RKPD. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk



setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada Rancangan Akhir RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Proses yang dilakukan dalam review Rancangan Akhir RKPD yaitu dengan membanding antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dimana Rancangan Akhir RKPD merupakan representasi dari Renstra Dinas Sosial yang kemudian diturunkan kedalam RENJA tahun 2026, proses review dilakukan untuk memastikan pencapaian target Renstra dan mengatasi isu-isu strategis Dinas Sosial dengan menganalisa kebutuhan akan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan proses yang dilakukan dalam review Rancangan Akhir RKPD, bahwa perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan analisis kebutuhan, didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Program-Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial;
2. Hasil Analisis kebutuhan merupakan representasi dari Renstra Dinas Sosial dalam mencapai Target Renstra;
3. Adapun untuk Perubahan Pagu, Indikator atau yang lainnya, akan dilakukan dalam Desk Renja Program dan Kegiatan dengan perangkat daerah terkait;

Berdasarkan temuan-temuan dalam perbandingan review Rancangan Akhir RKPD, berikut hasil review Rancangan Akhir RKPD dengan analisis kebutuhan.



Tabel 2.19
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp 26.736.518.416	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp 26.736.518.416	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Rp 13.652.995.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Rp 13.652.995.250	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp 15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp 15.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 15.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp 11.005.008.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp 11.005.008.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/Bulan	Rp 10.995.008.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/Bulan	Rp 10.995.008.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	Rp 10.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 590.988.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 590.988.250	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 50.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 70.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 70.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 195.988.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 195.988.250	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 60.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	Rp 25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	Rp 25.000.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 30.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 100.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 250.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 100.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 100.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 150.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 818.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 818.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp 468.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp 468.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 350.000.000	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 973.999.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp 973.999.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 200.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 249.769.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 249.769.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Rp 124.230.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Rp 124.230.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 400.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial	100%	Rp 2.387.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial	100%	Rp 2.387.000.000	
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.387.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.387.000.000	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	Rp 987.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	Rp 987.000.000	
2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	24 Lembaga	Rp 500.000.000	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	24 Lembaga	Rp 500.000.000	



3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	262 Orang	Rp 900.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	262 Orang	Rp 900.000.000	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		Rp 4.962.840.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		Rp 4.962.840.000	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		Rp 4.962.840.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		Rp 4.962.840.000	
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	Rp 1.000.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	Rp 1.000.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	770 Orang	Rp 100.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	770 Orang	Rp 100.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Rp 629.840.000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Rp 629.840.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp 683.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp 683.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 200.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 200.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Rp 1.350.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Rp .350.000.000	
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 200.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 200.000.000	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Rp 100.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Rp 100.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	470 Orang	Rp 200.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	470 Orang	Rp 200.000.000	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	475 Orang	Rp 50.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	475 Orang	Rp 50.000.000	
11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 400.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 400.000.000	
12	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 50.000.000	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 50.000.000	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS		Rp 3.040.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS		Rp 3.040.000.000	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 3.040.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 3.040.000.000	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	112 Orang	Rp 350.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	112 Orang	Rp 350.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 240.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 240.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6363 Orang	Rp 2.000.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6363 Orang	Rp 2.000.000.000	
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	54000 Usulan	Rp 450.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	54000 Usulan	Rp 450.000.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Rp 1.901.683.166	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Rp 1.901.683.166	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial		Rp 1.295.111.166	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial		Rp 1.295.111.166	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	Rp 595.111.166	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	Rp 595.111.166	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp 150.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp 150.000.000	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 150.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 150.000.000	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 150.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 150.000.000	
5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 250.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 250.000.000	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 606.572.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 606.572.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	Rp 50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	Rp 50.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	Rp 50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	Rp 50.000.000	
3	Fasilitasi Kampung siaga bencana dan lumbung sosial bagi masyarakat diwilayah rawan bencana	Jumlah Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	6 desa/ kelurahan	Rp 356.572.000	Fasilitasi Kampung siaga bencana dan lumbung sosial bagi masyarakat diwilayah rawan bencana	Jumlah Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	6 desa/ kelurahan	Rp 356.572.000	
4	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60 Orang	Rp 100.000.000	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60 Orang	Rp 100.000.000	
5	Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanggulangan bencana pada lokasi rawan bencana	1.000 Orang	Rp 50.000.000	Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan edukasi penanggulangan bencana pada lokasi rawan bencana	1.000 Orang	Rp 50.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Area	Rp 792.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Area	Rp 792.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Area Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Area	Rp 792.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Area Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Area	Rp 792.000.000	
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 250.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 250.000.000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	247 Makam	Rp 542.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	247 Makam	Rp 542.000.000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Dinas Sosial yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, *belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi.*



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi yang dipilih Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RANCANGAN AKHIR RPJMD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- c. Optimisasi Pendayagunaan data dan informasi PPKS.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Dinas Sosial akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Dinas Sosial Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini.



Tabel
Program Dukungan Dinas Sosial Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA							
PN 4							
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.325	2.700	3.240	3.888	4.666	Sosial
PN 6							
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.325	2.700	3.240	3.888	4.666	Sosial
PROGRAM/PROYEK STRATEGIS NASIONAL							
Pengentasan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.325	2.700	3.240	3.888	4.666	Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Bekasi telah menerapkan dan menetapkan target pencapaian SPM, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi
sebagaimana tercantum dalam SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM)	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	300 Orang
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	350 Orang
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	150 Lansia
4	Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	200 Orang
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	450 Orang

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam mendukung capaian kinerja Kota Bekasi yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, maka tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Persentase PPKS yang terlayani	6%	7%	8%	9%	10%	
			Persentase PSKS yang berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	6%	7%	8%	9%	10%	
		Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, maka Dinas Sosial menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan yang berlandaskan program prioritas dimaksud, khususnya untuk Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2026, adapun Kebutuhan Program dan Kegiatan itu meliputi Belanja Langsung Penunjang urusan (BLPU) sebanyak **1** Program dan **7** Kegiatan sedangkan untuk Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak **5** Program dan **7** Kegiatan, dalam menjalankan program dan kegiatan dimaksud, Dinas sosial Menggunakan **Potensi ekonomi daerah**, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPKAD Kota Bekasi menjadi Pagu anggaran Kegiatan dalam pencapaian Tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tabel Rencana Program dan kegiatan sebagai berikut (terlampir) :



Tabel 2.19
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN
2026 DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tata Kelola Pemerintahan	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tata Kelola Pemerintahan	100%		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	50.000.000	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.295.981.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.295.981.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	9.245.981.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	9.245.981.000	



3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	50.000.000	
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80	75.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	75.000.000	
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah			885.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			885.000.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	



11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	50.000.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30.000.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	25.000.000	
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	50.000.000	
v	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.000.000.000	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.000.000.000	
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	500.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	500.000.000	
16	Pengadaan peralatan da mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	500.000.000	Pengadaan peralatan da mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	500.000.000	
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.459.465.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.459.465.100	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	175.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	175.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	2.279.465.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	2.279.465.100	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			675.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			675.000.000	



20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000	
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	10	150.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	150.000.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	75.000.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.166.240.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.166.240.000	
viii	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	100.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	100.000.000	
24											



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

ix	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.066.240.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.066.240.000	
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	616 orang	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	616 orang	500.000.000	
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	500.000.000	
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	1.000.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	1.000.000.000	
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	376	2.066.240.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	376	2.066.240.000	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	13.750.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	13.750.000.000	



x	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			6000 Orang	8.300.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			6000 Orang	8.300.000.000	
29	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1.200.000.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1.200.000.000	
30	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	350.000.000	
31	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	1.600.000.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	1.600.000.000	
32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350	600.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350	600.000.000	
33	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	600.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	600.000.000	



34	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	1.400.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	1.400.000.000	
35	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	200.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	200.000.000	
36	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	
37	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	250.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	250.000.000	
38	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	550.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	550.000.000	
39	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	350.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	350.000.000	
40	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	200.000.000	
xi	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial		100%	5.450.000.000	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial		100%	5.450.000.000	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

41	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	250.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	250.000.000	
42	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	550.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	550.000.000	
43	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300.000.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300.000.000	
44	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	350.000.000	
45	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.600.000.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.600.000.000	
46	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	200.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	200.000.000	
47	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 oran	200.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 oran	200.000.000	



48	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000	
49	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	
50	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	
51	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	
52	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	2.325.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	2.325.000.000	
xii	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		90 Orang	225.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		90 Orang	225.000.000	
53	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	75.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	75.000.000	



54	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	75.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	75.000.000	
55	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	75.000.000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	75.000.000	
xiii	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000	
56	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	800.000.000	
57	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 org	600.000.000	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 org	600.000.000	
58	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	700.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	700.000.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100%	3.400.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100%	3.400.000.000	



xiv	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2.150.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2.150.000.000	
59	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	750.000.000	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	750.000.000	
60	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350.000.000	
61	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6	350.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6	350.000.000	
62	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400.000.000	
63	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	300.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	300.000.000	
xv	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100%	1.250.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100%	1.250.000.000	



64	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	400.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	400.000.000	
65	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	850.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	850.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1 Area	1.450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1 Area	1.450.000.000	
xvi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1 Area	1.450.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1 Area	1.450.000.000	
66	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	300.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	300.000.000	
67	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	248	700.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	248	700.000.000	
68	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	450.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	450.000.000	



Dari tabel diatas, Dinas Sosial Memiliki **6** Program, **16** Kegiatan dan **68** Sub Kegiatan dengan usulan Pagu sebesar **Rp. 39.606.686.100,-** (Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).

Dari Program dan Kegiatan yang direncanakan di tahun 2026, keseluruhannya dilaksanakan di Wilayah Kota Bekasi, yang terdiri dari 12 Kecamatan dan Kelurahan yang menyesuaikan kebutuhan dan Laporan dari masyarakat mengenai penanganan kesejahteraan sosial.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun anggaran 2026 telah merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih dan mengacu kepada program prioritas kepala daerah terpilih, guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi, tidak terlepas dari hasil Musrembang tingkat kota Bekasi dimana usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat kota Bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial kota Bekasi .



Rencana Kerja Program dan Kegiatan SIPD Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Dinas Sosial					26.736.518.416,00								26.911.721.000,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					26.736.518.416,00								26.911.721.000,00		
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					26.736.518.416,00								26.911.721.000,00		
1	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Panganggaran	-			100 %	13.652.995.250,00							-	12.823.481.000,00	
	1	06	01	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	-			4 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	-	0,00		
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	-			21 Laporan	11.005.008.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	-	9.295.981.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1176 Orang/bulan	10.995.008.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		9.245.981.000,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	70.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		200.000.000,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		30.000.000,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	-			12 Laporan	818.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	-	675.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			1 Laporan	973.999.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	-	775.000.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	249.769.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi		150.000.000,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial	-			100 %	2.387.000.000,00					-	4.166.240.000,00		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	2.387.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	PSKS Kota Bekasi	-	4.166.240.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	987.000.000,00		Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	PSKS Kota Bekasi		2.066.240.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota														



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi				24 Lembaga	500.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	PSKS Kota Bekasi		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				2144 Orang	900.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	PSKS Kota Bekasi		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	-			100 %	4.962.840.000,00						-	2.550.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	-			100 %	4.962.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi	-	2.550.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	1.000.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	1.350.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	400.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. SPM BIDANG SOSIAL	PPKS Kota Bekasi		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	PPKS Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	240.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
						Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6363 Orang	2.000.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		2.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				5400 Usulan	450.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	-	Masyarakat Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	150.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	250.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-			100 %	606.572.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	-	Masyarakat Kota Bekasi	-	700.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

							Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi				6 Desa/Kelurahan	356.572.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
							Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				60 Orang	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bekasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
							Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				1000 Orang	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	Masyarakat Kota Bekasi		400.000.000,00	DINAS SOSIAL



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

										250 Makam	542.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Taman Makam Pahlawan	800.000.000,00	DINAS SOSIAL
										J U M L A H	26.736.518.416,00						26.911.721.000,00	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

			X	XX	1	201		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4	50.000.000	4	150.000.000	Sekretariat
			X	XX	1	201	6	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	50.000.000	4	150.000.000	Sekretariat
			X	XX	1	202		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.295.981.000	100%	9.395.981.000	Sekretariat
			X	XX	1	202	1	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	9.245.981.000	42	9.245.981.000	Sekretariat
			X	XX	1	202	5	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21	21	50.000.000	21	150.000.000	Sekretariat
										Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%		100%		
			X	XX	1	205		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	200.000.000	100%	250.000.000	Sekretariat



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

					X	XX	1	205	2	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77	85	100.000.000	85	100.000.000	Sekretariat
					X	XX	1	205	9	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	30	100.000.000	30	150.000.000	Sekretariat
											Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%			
					X	XX	1	206	4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.077.500.000	100%	1.295.000.000	Sekretariat
					X	XX	1	206	1	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Sekretariat
					X	XX	1	206	2	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 PAKET	4	250.000.000,00	4	300.000.000,00	Sekretariat
					X	XX	1	206	3	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 PAKET	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	Sekretariat
					X	XX	1	206	4	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 PAKET	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	Sekretariat



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

				X	XX	1	206	5	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 PAKET	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	Sekretariat	
				X	XX	1	206	6	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	Sekretariat	
				X	XX	1	206	8	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 LAPORAN	30	40.000.000,00	30	50.000.000,00	Sekretariat	
				X	XX	1	206	9	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 LAPORAN	-10	30.000.000,00	-10	35.000.000,00	Sekretariat	
				X	XX	1	206	10	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 DOK	2	7.500.000,00	2	10.000.000,00	Sekretariat	
											Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%			
				X	XX	1	208	5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.461.965.100	100%	7.205.279.300	Sekretariat	
				X	XX	1	208	1	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	Sekretariat	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

			X	XX	1	208	2	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 LAPORAN	24	175.000.000,00	24	200.000.000,00	Sekretariat	
			X	XX	1	208	4	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 LAPORAN	48	2.279.465.100,00	48	2.279.465.100,00	Sekretariat	
										Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%			
			X	XX	1	207	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20	1.000.000.000	20	2.400.000.000	Sekretariat	
			X	XX	1	207	5	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10	500.000.000	10	1.200.000.000	Sekretariat	
			X	XX	1	207	6	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	500.000.000	10	500.000.000	Sekretariat	
			X	XX	1	209	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	775.000.000	100%	1.745.000.000	Sekretariat	



				X	XX	1	209	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 UNIT	-6	175.000.000	-6	200.000.000	Sekretariat	
				X	XX	1	209	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 UNIT	-10	150.000.000	-10	175.000.000	Sekretariat	
				X	XX	1	209	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 UNIT	-85	100.000.000	-85	100.000.000	Sekretariat	
				X	XX	1	209	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 PAKET	-2	350.000.000	-2	400.000.000	Sekretariat	
2			Meningkatkan Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)											Persentase PPKS binaan yang mandiri		6%		7%		Dinas Sosial	
	2		Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)											Persentase PPKS binaan yang mandiri		6%		7%		Dinas Sosial	



Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi

Tahun 2026

				1	6	5	201	2		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	100.000.000	130 Orang	275.000.000	Bidang Rehsos	Kota Bekasi	
				1	6	5	201	3		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	100.000.000	120 Orang	275.000.000	Bidang Rehsos	Kota Bekasi	
				1	6	5	202			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2.400.000.000	2	6.300.000.000		
				1	6	5	202	1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.018.773 org	1.355.986 org	700.000.000	1.800.000.000	Bidang Gulmakin	Kota Bekasi	
				1	6	5	202	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 255.000 Orang, Data LKM : KPM PKH : 40.000, BPNT : 50.000 Kube e-warung : 60 Warung	PBI : 450.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 54.000, BPNT : 65.000 Kube e-warung : 60 warung	900.000.000	PBI : 500.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 55.000, BPNT : 70.000 Kube e-warung : 60 warung	2.400.000.000	Bidang Linjamsos	Kota Bekasi
				1	6	5	202	4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	800.000.000	2.100.000.000		Kota Bekasi		



3	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)																	Persentase PSKS yang berfungsi	100%		100%	0		
		3	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)															Persentase PSKS yang berfungsi	100%		100%	0		
				1	6	2												PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial	100%	4.266.624.000	100%	4.266.624.000	Dinas Sosial
				1	6	2	202											Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	100.000.000	3	300.000.000	Bidang Pemsos
				1	6	2	202	1										Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	100.000.000	3	300.000.000	Bidang Pemsos



BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026, merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 -2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026. Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bekasi untuk mewujudkan ***Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.***

Kaidah Pelaksanaan Umum

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RANCANGAN AKHIR RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Sosial berkewajiban menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renja, Dinas Sosial Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan diperlukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi antara satuan kerja perangkat daerah, instransi vertikal di daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah, DPRD serta seluruh komponen masyarakat Kota Bekasi.



2. Seluruh Pegawai Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang tertuang dalam renja Dinas Sosial tahun 2026.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja sesuai dengan tupoksi dan melakukan koreksi yang diperlukan serta hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota.
4. Pada akhir tahun anggaran 2026, wajib melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2026 dan dilaporkan kepada Wali Kota

Bekasi,

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010